

# Giliran Yahya Muhaemin

Ariel Heryanto

HINGGA saat tulisan ini tersusun, atau setelah berusia seminggu, kasus protes Probosutedjo terhadap Yahya Muhaemin dan LP3ES tampaknya memberikan lebih banyak hikmah ketimbang bencana. Kita layak berterima kasih kepada semua pihak yang ikut terlibat, termasuk para "penggembira" di media massa. Jika kasusnya tidak memburuk, tak ada jeleknya kasus itu terjadi lebih banyak.

## Hikmah

Hikmah pertama, kasus ini menunjukkan ternyata ilmuwan kita, bahkan pegawai negeri, masih perduli pada realitas sosial-ekonomi masyarakatnya sendiri. Lebih menggembarakan, ternyata karya seperti itu diminati dan dibaca pembaca umum terpelajar.

Karya ilmiah para akademikus kita tidak difosilkan di gedung perpustakaan sebagai barang istimewa yang hanya boleh disentuh debu, labalaba dan segelintir elit penguasa dunia akademik. Ternyata ilmuwan dan penerbit karya ilmiah bersikap terbuka kepada publik, termasuk membuka diri pada protes dan kritik dari publik yang membaca karya itu.

Kedua, publik kita tidak sebodoh dan sedingin yang dituduh banyak pihak. Mereka membaca karya ilmiah, dari seorang doktor sekali pun, dengan sikap kritis (yang dibanggakan dan dikampanyekan ilmuwan). Tidak semua pengusaha bersikap

seperti Liem Sioe Liong yang kelihatannya tak peduli dengan segala kritik para penulis. Sungguh keliru, bukan saja sombong dan angkuh, jika kaum akademikus menganggap bangsa Indonesia masih belum memiliki "kebudayaan politis" yang siap mencerna kajian ilmiah tentang bangsanya. Tuduhan semacam itu, bila ada, merupakan penghinaan yang jauh lebih kejam ketimbang tuduhan penghinaan yang muncul dari kasus buku Yahya Muhaemin.

Tentu saja ini tidak berarti kritik atau protes dari publik pembaca karya ilmiah itu dapat dijamin merupakan kritik yang benar atau protes yang tepat. Sama halnya isi sebuah karya ilmiah belum tentu serba benar, biar pun sudah pernah diuji dalam suatu sidang akademik. Kebenaran selalu (dan sekaligus hanya) dicapai dalam sifatnya yang "sementara" dan "terbatas". Jadi harus senantiasa diuji-ulang berkali-kali dan terus-menerus dilengkapi.

Hikmah ketiga, reaksi protes dari Probosutedjo disampaikan dalam batas-batas kewajaran etis. Ia memberikan penjelasan bantahan dan tuntutan kepada yang diprotesnya, serta ancaman gugatan pengadilan. Dengan kata lain sampai pada tahap ini, reaksi itu bersifat "konstitusional". Kita bersyukur dari pihak mana pun tak muncul intimidasi ikonstitusional, atau kekerasan apa pun yang tak sesuai dengan pera-

daban manusia.

Ditilik dari sini, ada baiknya kasus itu tidak terhenti menjadi uap. Kita berharap akan ada pergulatan kebenaran secara jujur, dewasa, kritis dan terbuka. Pergulatan ini tidak harus dilaksanakan di sidang pengadilan. Kalau pun akan disidangkan, juga tak ada jeleknya asalkan lembaga peradilan yang handal secara legal, etis, mau pun ilmiah!

## Pribadi, profesi, prinsip

Hikmah keempat, perhatian dan simpati kepada Yahya Muhaemin, khususnya dari rekan seprofesi, menunjukkan solidaritas yang menggembarakan. Walau mengaku siap mempertanggungjawabkan bukunya "secara ilmiah," Yahya kelihatan "terpukul" oleh kasus ini dari segi-segi yang non-ilmiah. Solidaritas rekan-rekannya merupakan dukungan non-ilmiah yang dibutuhkannya.

Mengapa bisa ada kesenjangan antara kesiapan ilmiah dan yang non-ilmiah? Ketegangan antara kutub ilmu dan non-ilmu, khususnya kekuasaan politik, bisa kita pahami walau tidak kita nyatakan. Lebih tepatnya dikatakan bahwa karena kita memahaminya maka (bukan walau) kita tak menyatakannya. Ketegangan itu menjadi persoalan pokok yang tak terungkap tegas dari kasus ini.

Persoalan pokok itu dapat dirumuskan sebagai berikut: (a) apakah kita sedang membela kebenaran dan prinsip-prinsip untuk menghormati kebenaran? Ataukah (b) kita sedang membela kekuasaan sosial dengan segala privilese yang dilegitimasi oleh apa

yang disebut "kebebasan mimbar akademik"? Ataukah (c) semua ini hanya persoalan solidaritas bersifat pribadi, usaha membantu seorang kenalan bernama Yahya Muhaemin yang diganggu kesulitan?

Setiap pilihan akan merumuskan titik persoalan secara berbeda-beda. Selain pahala yang ingin dicapai lain, ongkos harus dibayar juga berbeda-beda.

Jika pilihan jatuh pada (c), maka persoalan pokoknya ialah bagaimana menggugurkan kasus ini. Dibuang ke mana? Sebut saja "budaya" masyarakat Indonesia masih belum siap dengan soal-soal orang penting seperti ini. Budaya masyarakat inilah yang kita salahkan. Kalau bisa kasus itu dikubur hidup-hidup. Anggap saja tak pernah ada. Caranya? Diusahakan "secara kekeluargaan". Dicari unsur-unsur primordialisme dan klientisme untuk melancarkannya.

Pilihan (b) tampaknya paling dominan dalam berbagai komentar di media massa, yang dibela bukan sekedar seorang pribadi tapi komunitas akademik. Pilihan (b) bukan solidaritas yang bebas pamrih. Pilihan ini bertolak dari kepentingan kelompok profesi. "Jika hari karya ilmiah Yahya bisa diobrak-abrik, barangkali besok giliran kita yang lain". Musuh untuk pilihan (b) dirumuskan tegas: setiap kekuatan elit yang mengancam privilese kaum akademikus profesional, termasuk birokrat yang non-ilmiah.

Apa yang dinamakan "mimbar akademik" dikeramatkan dan dijadikan senjata propa-

ganda. Persis seperti apa yang dikerjakan banyak pejabat pemerintahan dengan slogan "Pembangunan" dan "Pancasila". Jalan ideologi para pemuka dan penguasa "mimbar bebas" itu begini: (i) kebenaran tingkat tertinggi berada di atas mimbar akademik; (ii) tak semua orang mampu naik ke atas mimbar akademik, dan karena itu (iii) tak semua orang berhak berbicara tentang kebenaran.

Dengan demikian kebenaran akademik merupakan kekuasaan sosial dan modal dalam kapitalisme informatif. Kebenaran, seperti aset ekonomi, dapat dimiliki secara monopoli atau oligopoli. Lewat kompetisi bebas atau sistem patron-klien.

Lebih jauh lagi kaum akademikus ini menuntut kebebasan akademik mereka bersifat "bebas hukum." Mirip seniman yang menuntut "kebebasan kreatif" (poetika lisensia). Atau para raja dan rejim modern di negeri-negeri sosialis atau kapitalis otoriter dan ternyata bisa "bebas hukum."

Pilihan (a) merupakan maklumat perang total pada setiap bentuk pemalsuan, penyangkalan, penyembunyian dan penindasan kebenaran atau upaya memahami kebenaran. Pilihan (a) menghargai kebenaran tanpa mempedulikan apakah kebenaran itu diucapkan atau dibantah oleh seorang doktor, profesor atau pelacur, raja atau hamba, seorang ekstrem kiri atau kanan. Dalam bahasa slogan Pancasila dan UUD '45, juga bahasa banyak agama, setiap orang diperlukan sama dan sederajat. Pilihan (b) tak mu-

dah dicapai dan ongkosnya bisa besar. Pilihan (a) lebih sulit dan resiko jauh lebih besar lagi.

Tak ada rumusan ilmiah untuk menentukan mana dari ketiga pilihan itu yang sebaiknya kita ambil. Pada setiap pilihan hanya ada nilai-nilai: etis campur ilmiah campur estetis campur ekonomis campur politikus campur teknis-praktis campur religius campur filosofis campur edukatif dan seterusnya. Tidak dapat dikatakan salah satu pilihan lebih "benar" secara "obyektif" daripada yang lain.

Tak ada keharusan logis bagi ketiga pilihan itu untuk saling bertabrakan. Ideal bila ketiganya dapat dipertemukan. Tapi bila ternyata ketiganya bertabrakan, setiap pilihan meminta korban.

## Perbandingan

Orang Jawa yang sangat canggih dalam filsafat relativisme biasa mengatakan "untung pada saat ada bencana. Ketika ada orang patah tulang kaki karena kecelakaan lalu lintas, dibilangnya "untung tidak mati". Jika dicari-cari "untung Jawa"-nya maka kita akan temui cukup banyak untung dari kasus buku Yahya itu.

Untung pertama, Yahya tidak (moga-moga tidak akan) digugat pemerintah RI. Pengugatnya "hanya" seorang warganegara RI terlepas dari segala keunggulan atau kelemahan pribadinya. Untung Yahya tidak didakwa subversif atau menghina pemerintah atau mengganggu stabilitas nasional dan Pembangunan.

Untung yang kedua, sebagai konsekuensi dari yang

pertama, Yahya hanya digugat menyangkut kebenaran isi tulisan ilmiahnya. Dia ditantang berdebat tentang kenyataan faktual. Dia siap untuk itu. Dia tidak digugat karena berpendapat tertentu. Bandingkan ini dengan nasib seorang mahasiswa yang berkuliah di fakultas Yahya. Tahun lalu mahasiswa ini dihukum 8 setengah tahun, antara lain karena dianggap terbukti mengucap dan menulis sejumlah kalimat untuk skripsinya. Pengadilan tidak mempersoalkan benar atau tidaknya isi pernyataan itu. Si mahasiswa tak mendapatkan solidaritas seperti yang diterima Yahya dari para pembela mimbar akademik-nya.

Pengadilan atas mahasiswa itu tak dapat disalahkan, minimal dari segi formal legal positif. Maklum, di negeri ini memang ada hukum yang mengatur larangan sejumlah ucapan atau pendapat. Terlepas dari cocok atau tidaknya isi ucapan itu dengan kenyataan. Mungkin karena adanya hukum seperti itu ilmuwan merasa gentar menghadapi hukum dan peradilan tak perduli betapa pun merasa benar secara "ilmiah". Stabilitas dan keamanan negeri ini tidak di bawah komando ilmuwan dan tidak disusur, secara "ilmiah."

Mengingat keadaan hukum itu, untung lain dari kasus ini ialah yang digugat bukan seorang anak muda atau mahasiswa yang untuk pertama kali dalam hidupnya mencari kebenaran akademik, menulis makalah atau skripsi. Jika bukan orang setanggul, Yahya yang menghadapi cobaan ini, siapa lagi yang dapat kita harapkan? ...

\*) Penulis adalah dosen Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.